

Filsafat dan Pandemi Covid- 19

Otto Gusti*

<https://mediaindonesia.com/read/detail/314173-filsafat-dan-pandemi-covid-19>

19/05/2020

Bagaimana mengatasi pandemi Covid 19, sesungguhnya bukan merupakan objek kajian filsafat. Hal ini lebih tepat dibicarakan oleh para dokter, pakar ekonomi dan ahli kebijakan publik. Akan tetapi, kajian yang lebih substansial seputar pandemi virus corona sudah pasti melibatkan filsafat.

Peran filsafat itu, meminjam ungkapan Slavoj Zizek, lebih sebagai “Unruhestifter” – “Pencipta Kegaduhan”. Peran ini sudah dihayati oleh filsafat sejak zaman Sokrates, yakni: “to corrupt the youth, to alienate (or, rather, ‘extraneous’ in the sense of Brecht’s *verfremden*) them from the predominant ideologico-political order, to sow radical doubts and enable them to think autonomously” - “Mengguncang pikiran generasi muda, menjauhkan mereka dari tatanan politik ideologi *mainstream*, menabur keraguan radikal dan memampukan mereka untuk berpikir mandiri”.

Sebagai *Unruhestifter*, filsafat dapat menjalankan sekurang-kurangnya dua peran penting dalam mengatasi pandemi Covid 19. *Pertama*, filsafat berperan mengkritisi model pembangunan ekonomi neoliberal yang telah menciptakan bencana ekologis. Menurut perkiraan World Health Organization (WHO), setiap tahun sekitar 4,2 juta penduduk dunia meninggal akibat polusi udara (Bdk. https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1). Perubahan iklim juga akan berdampak pada penambahan angka kematian sebesar 250 ribu orang dalam periode 2030-2050. Jika tidak ada langkah radikal dalam mengubah model pembangunan, kerusakan ekosistem akan berakibat pada munculnya pandemi ganas lain di masa depan.

Di hadapan sistem pembangunan yang eksploitatif dan destruktif terhadap ekologi, filsafat menampilkan kodratnya sebagai sebuah sistem berpikir subversif. Artinya, filsafat adalah sebuah metode berpikir kritis yang menentang setiap tatanan *status quo*. Berhadapan dengan paradigma pembangunan neoliberal *mainstream*, filsafat tampil sebagai sebuah kekuatan provokatif. Namun Zizek berpandangan bahwa peran subversif sangat sulit dijalankan oleh filsafat dalam masyarakat Barat kontemporer. Alasannya, manusia modern tidak lagi hidup dalam sebuah tatanan totaliter tapi masyarakat liberal yang mengajarkan: jadilah dirimu sendiri, beranilah mengungkapkan dirimu apa adanya. Jadi perbudakan justru terjadi di tengah kondisi yang seolah-olah bebas.

Subjek dalam masyarakat modern menurut Zizek berada dalam samudera pilihan-pilihan bebas. Ia dapat bepergian ke mana saja dan mengkonsumsi apa yang disukainya. Identitas personal dan kecenderungan seksual dapat selalu direkonstruksi secara baru. Seorang manager atau pengusaha dapat mencoba pelbagai pekerjaan yang diinginkannya. Namun, pilihan-pilihan bebas itu akhirnya berubah menjadi keharusan untuk memilih dan bermuara pada jajahan atau perbudakan *Ueber-Ich* (super ego): Kita harus terus mengkonsumsi, menemukan diri secara baru, agar dapat mengikuti perkembangan super cepat masyarakat kapitalis.

Akibat dari perbudakan *Ueber-Ich*, manusia modern terperangkap dalam budaya konsumtif dan hedonis. Guna memenuhi naluri hedonisme konsumtif masyarakat kapitalis, sistem ekonomi neoliberal melebarkan sayapnya ke negara-negara dunia ketiga yang memberi upah rendah kepada buruh dan mempekerjakan anak di pabrik-pabrik. Eksploitasi adalah sebuah keniscayaan agar roda mesin kapitalisme terus berputar. Tugas filsafat dalam kondisi seperti ini menurut Zizek ialah membuka mata generasi muda terhadap bahaya nihilisme yang berbusana kebebasan tanpa norma. Kita sedang hidup di masa krisis di mana identitas kita tidak lagi berpijak pada tradisi. Suatu masa di mana tak ada struktur makna dan tatanan nilai yang memungkinkan manusia untuk hidup melampaui prinsip hedonisme kapitalis.

Kedua, filsafat memberikan pertimbangan etis atas kebijakan “herd immunity” untuk mengatasi pandemi Covid 19. Herd immunity atau kekebalan komunitas terbentuk setelah mayoritas sembuh dari infeksi patogen. Caranya dengan vaksinasi atau membiarkan tubuh terinfeksi penyakit. Pada tahun 1918 misalnya dunia mengalami pandemi flu atau dikenal dengan flu Spanyol. Karena vaksin belum ditemukan, maka *herd immunity* terbentuk lewat cara alami. Diperkirakan sepertiga dari penduduk dunia atau 500 juta penduduk terinfeksi virus influenza. 50 juta di antaranya meninggal dunia karena kekebalan tubuh tidak cukup kuat ketika virus dibiarkan masuk ke dalam tubuh manusia.

Karena vaksin belum ditemukan, sejumlah negara coba menerapkan *herd immunity* untuk mengatasi pandemi Covid 19. Pendekatan ini pertama kali dianjurkan oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Akan tetapi pemerintah Inggris akhirnya mengubah kebijakan karena menurut perkiraan para ahli pendekatan herd immunity bisa berakibat pada meningkatnya angka kematian di Inggris karena Covid 19 sampai angka 250 ribu orang (Bdk. Isabel Frey, 2020).

Dalam mengatasi Covid 19 tanpa vaksin, Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa dapat menggunakan opsi *herd immunity* jika 156 juta populasi terinfeksi. 140 juta dari yang terinfeksi diperkirakan akan sembuh tanpa perawatan dan 7,5 juta jiwa akan meninggal dunia (Bdk. Iqbal Mochtar, Kompas 5 Mei 2020). Bayangkan, demi kepentingan mayoritas sejumlah jiwa harus dikorbankan.

Basis etis penerapan *herd immunity* antara lain prinsip utilitarisme. Utilitarisme bertolak dari prinsip “the greatest happiness of the greatest number” – “Kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar orang”. Artinya, satu orang boleh saja dibunuh untuk kepentingan banyak orang. Atau dalam konteks penerapan herd immunity untuk mengatasi pandemic Covid 19, beberapa orang boleh saja menjadi korban agar sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap virus corona. Akan tetapi pendekatan ini bertentangan dengan prinsip martabat manusia yang memiliki nilai *an sich* dan tidak boleh diinstrumentalisasi untuk kepentingan apa saja.

Kelemahan dasar prinsip utilitarisme ialah bahwa ia bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak. Karena kriteria utilitarisme adalah kebaikan mayoritas (the greatest number), maka hak dasar individu atau kelompok minoritas boleh saja dihilangkan. Dengan demikian utilitarisme menciptakan ketidakadilan terhadap yang kecil atau lemah.

Dalam kenyataan, pendekatan herd immunity guna mengatasi pandemi virus corona diterapkan oleh negara-negara yang dalam beberapa tahun terakhir mengikuti kebijakan ekonomi neoliberal.

Neoliberalisme menggantikan kebijakan sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan) yang dibiayai negara dengan paradigma privatisasi dan deregulasi pasar bebas. Neoliberalisme dibangun di atas iman akan keadilan inheren pasar bebas yang dianggap sebagai rasionalitas pasar yakni profit mendahului manusia. Dalam kaca mata neoliberalisme, kebijakan herd immunity adalah pendekatan yang paling efisien karena membebaskan negara dari tanggung jawab untuk membiayai sistem kesehatan melawan pandemi. Dari perspektif neoliberalime, kematian karena pandemi Covid 19 tidak dilihat sebagai akibat kegagalan kebijakan negara, tapi karena virus yang terlalu ganas.

*Dosen Filsafat di STFK Ledalero, Maumere, Flores